

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Berlandaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan berasal dari kata 'daya' yang maknanya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. KBBI mengartikan pemberdayaan sebagai proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Marmoah, (2014:46) menyatakan pemberdayaan masyarakat yaitu upaya dalam memberdayakan individu maupun kelompok yang semula memiliki sifat pasif pada lingkungan sehingga menjadi aktif juga mampu mengarahkan masyarakat lainnya. Dewa Ketut (2023:177) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat ialah rangkaian pembelajaran oleh dan untuk masyarakat guna mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka di komunitas baik urusan ekonomi, sosial dan budaya. Pemberdayaan masyarakat adalah reformasi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat pedesaan di negara berkembang sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Ahmad & Talib, 2015) dalam Eva (2021:19). Ahli lain, Wrihatnolo (2007: 115) dalam Ardito (2018:16) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: (1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; dan (2) usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan menurut Parsons (2003:59) dalam (Marmoah, 2014:52) adalah proses di mana seseorang memperoleh kekuatan untuk mengambil bagian dalam mengelola dan memengaruhi lembaga-lembaga dan peristiwa yang

berdampak pada kehidupan mereka. Ini berarti seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup dapat memengaruhi kehidupan dirinya dan orang lain.

Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Afriansyah, dkk (2023:3) terdapat beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, antara lain;

1. Britha, Mikkelsen (2011). menurutnya pemberdayaan ialah persatuan aktivitas serta kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.
2. Gitosaputro, S & Ranga K.K (2015), pemberdayaan masyarakat ialah proses mendorong masyarakat untuk mengambil inisiatif dan memulai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan mereka.
3. Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016), definisi pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya
4. Menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat yang lebih lemah, seperti mereka yang sedang berjuang melawan kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan mengidentifikasi keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan atau kekuasaan, dan mampu memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosialnya, termasuk rasa percaya diri, kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan kemandirian dalam melakukan tugas-tugas kesehariannya.

2.1.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Isbandi Rukminto Adi (2013: 179), pemberdayaan masyarakat melibatkan tujuh tahapan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, terdapat dua langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, penyiapan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pekerja komunitas. Kedua, penyiapan lapangan, yang merupakan prasyarat keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat, yang sebaiknya dilakukan secara non-direktif.

2. Tahap Pengkajian (Assessment)

Tahap ini melibatkan proses pengkajian yang dapat dilakukan secara individu melalui tokoh masyarakat, atau melalui kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (felt needs) serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Di tahap ini, petugas sebagai agen perubahan melibatkan warga secara partisipatif untuk memikirkan masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. Masyarakat diharapkan dapat merumuskan berbagai alternatif program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan.

4. Tahap Pemformulasi Rencana Aksi

Pada tahap ini, agen perubahan membantu setiap kelompok merumuskan dan menentukan program serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, petugas juga membantu mengkonversi ide-ide mereka menjadi bentuk tertulis, khususnya ketika berkaitan dengan penyusunan proposal untuk penyanggah dana.

5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, diharapkan peran masyarakat sebagai kader dapat mendukung keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat sangat penting

pada tahap ini, karena terkadang, rencana yang telah disusun dengan baik dapat menyimpang di lapangan.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengawasan oleh warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Sebaiknya, evaluasi ini melibatkan partisipasi warga. Dengan keterlibatan mereka, diharapkan dalam jangka pendek terbentuk sistem komunitas yang dapat melakukan pengawasan internal, sedangkan dalam jangka panjang dapat membangun masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi adalah fase pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pada tahap ini, proyek diharapkan segera dihentikan. Meskipun demikian, petugas harus tetap menjaga kontak, meskipun tidak secara rutin, dan secara perlahan-lahan mengurangi interaksi dengan komunitas sasaran.

2.1.3 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak hanya membuat masyarakat lebih bergantung pada berbagai program donasi karena setiap barang yang dimiliki harus dibuat dengan usaha sendiri dan dapat dipertukarkan dengan orang lain. Moelijarto dalam Afriansyah, dkk (2023:6) mengatakan bahwa potensi ada di dalam setiap orang dan masyarakat. Pemberdayaan menjadi sebuah cara agar potensi dapat dibangun, memberikan motivasi, bangkit dan menyadari kemampuan diri, serta berkeinginan teguh untuk meningkatkannya.

Mardikanto, dkk (2013:109), memaparkan tujuan pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*). Kelembagaan dapat diperbaiki dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan. Masyarakat didorong dapat mengambil peran dalam kegiatan yang berarti menunjukkan kelembagaan yang baik.

2. Perbaikan Usaha (*Better Business*). Diharapkan bahwa perbaikan kelembagaan akan meningkatkan kegiatan untuk memberi manfaat bagi anggota lembaga dan masyarakat setempat.
3. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*). Semua anggota lembaga, termasuk masyarakat, harus melihat peningkatan pendapatan sebagai hasil dari peningkatan bisnis. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam pendapatan keuangan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*). Kemiskinan atau pendapatan yang terbatas kerap kali menjadi penyebab kerusakan lingkungan fisik dan sosial. Sehingga perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*). Tingkat kehidupan masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dan lingkungan yang sehat. Tingkat daya beli, pendidikan, dan kesehatan semuanya mencerminkan hal ini. Kapasitas untuk menghasilkan uang akan meningkatkan kehidupan masyarakat.
6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*). Keluarga yang baik akan menghasilkan keluarga yang lebih baik juga, oleh karena itu diperlukan perbaikan masyarakat.

2.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Marmoah (2014:66) dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba" menyatakan bahwa "konsep pemberdayaan perempuan dalam literature pembangunan memiliki perspektif yang sangat luas. Pemberdayaan perempuan adalah peningkatan kemandirian perempuan dengan menghormati kebhinekaan dan kekhasan lokal". Mutawali (2001:12) dalam Marmoah (2014:66), menyebutkan bagaimana peran perempuan dapat dilihat dari sudut pandang internal dan eksternal. Komponen internal berupa fungsinya dalam kehidupan keluarga,

yang meliputi membesarkan anak, mendidik, dan membantu keluarga menjadi makmur dan sehat secara fisik dan emosional. Namun, ia juga memainkan peran eksternal di luar keluarga, yaitu membantu pertumbuhan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan.

Berkaitan dengan hal ini, Payne (2001:68) mengemukakan bahwa:

"...to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients".

Tujuan mendasar dari proses pemberdayaan (*empowerment*) adalah untuk membantu klien mendapatkan kemampuan untuk memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan, termasuk mengurangi dampak dari hambatan sosial dan pribadi dalam bertindak. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri mereka untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri, termasuk dengan mentransfer kekuatan dari lingkungan mereka.

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu cara strategis serta upaya dalam peningkatan potensi perempuan dalam meningkatkan kapabilitas dan keterampilannya dalam meraih akses dan penguasaan terhadap beberapa aspek berikut: pengambilan keputusan, sumber-sumber dan struktur atau lajur yang menahan. Pemberdayaan perempuan dengan bekal informasi dalam proses pembinaan, pendidikan pelatihan dan dorongan agar mengenal jati diri, lebih optimistis, dapat menetapkan keputusan yang diperlukan, mampu menunjukan diri, mempengaruhi, menggerakkan perempuan agar dapat mengubah dan membenahi keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan komprehensif Aritonang, (2000, hlm 142-143) dalam Monita (2024). Selanjutnya, Prijono dan Pranaka (1996) berpendapat bahwa meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan untuk lebih terlibat, kekuasaan pengambilan keputusan dan pengawasan, serta tindakan transformasi yang mengarah

pada kesetaraan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan adalah proses pemberdayaan perempuan.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Alim (2019:20), meliputi:

1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
3. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.
4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

Sedangkan menurut Nugroho (2008), tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek pembangunan sebagai subjek dan bukan sebagai objek pembangunan, seperti yang terjadi selama ini.
2. Memperkuat kemampuan kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan daya negosiasi dan partisipasi mereka dalam semua pembangunan, baik sebagai pelaksana, perencana, maupun pemantau dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan perempuan untuk menjalankan usaha kecil dan besar serta perusahaan skala rumah tangga dalam rangka mendorong peningkatan kebutuhan rumah tangga dan memberikan peluang kerja yang mandiri dan bermanfaat.

Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif pembangunan di tempat tinggalnya.

2.2.3 Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan yang diperhitungkan untuk meningkatkan potensi mereka dan meningkatkan tanggung jawab mereka di rumah dan di masyarakat. Menurut Zakiah (2010), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menghilangkan mitos bahwa perempuan adalah pelengkap dalam rumah tangga. Di masa lalu, ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa perempuan adalah konco wingking, atau “teman di belakang”, dan bahwa orang nunut neraka katut, atau “ke surga ikut, ke neraka ikut.” Dalam bahasa Jawa, istilah “nunut” dan “katut” menyiratkan kepasifan dan kurangnya inisiatif, sehingga nasib mereka sangat bergantung pada suami.
2. Memberi perempuan akses dalam keterampilan. Menjadikan perempuan produktif dan tidak bergantung pada laki-laki adalah tujuan dari pendekatan ini. Menjahit, menyulam, dan kewirausahaan dapat diajarkan melalui produksi pakaian batik dan jenis masakan lainnya.
3. Berikan kesempatan kepada perempuan untuk mengikuti atau mencari kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Hal ini diperlukan karena masyarakat masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur dengan tingkat pendidikan setinggi apapun. Hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

2.2.4 Langkah-Langkah Pemberdayaan Perempuan

Menurut Sulistyani (2004), tahapan atau langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga membuat mereka menyadari perlunya mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses pemberdayaan. Pada tahap ini, para pelaku dan pemberdaya berupaya membangun prasyarat untuk mendukung proses pemberdayaan yang

efektif. Keinginan dan pengetahuan masyarakat tentang kondisi yang ada akan semakin terpicu dengan adanya sentuhan penyadaran yang akan membuat mereka semakin sadar akan perlunya memperbaiki kondisi untuk membangun masa depan yang lebih cerah.

2. Tahap transformasi kemampuan, yang meliputi wawasan pengetahuan, keterampilan untuk memberikan keterampilan dasar dan membuka wawasan agar orang dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Jika langkah awal sudah terkondisikan, maka proses perubahan pengetahuan dan kemampuan dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan efektif. Masyarakat akan melalui proses belajar tentang keterampilan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat saat ini mungkin memberikan tingkat keterlibatan yang sederhana, yaitu sebatas sebagai pengikut atau objek pembangunan daripada sebagai subjek pembangunan pada saat ini.
3. Tahap pengembangan kecakapan intelektual dan keterampilan untuk menumbuhkan inisiatif dan pemikiran kreatif yang pada akhirnya akan menghasilkan kemandirian. Ini adalah tahap di mana kapasitas intelektual dan keterampilan mereka ditingkatkan atau diperbaiki untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk mandiri. Kemampuan masyarakat untuk berinisiatif, menciptakan sesuatu, dan berinovasi di lingkungannya akan menentukan kemandirian ini. Masyarakat akan mampu melakukan pembangunan sendiri jika sudah bisa menyelesaikan tahapan ini.

2.2.5 Indikator Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut (Suharto, 2003):

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

2.3 Bank Sampah

2.4.1 Pengertian Bank Sampah

Menurut Bambang Wintoko (2013, hlm. 57), Penabung sampah dapat menerima layanan dari teller bank sampah di bank sampah. Istilah “bank sampah” mengacu pada inisiatif pengelolaan sampah masyarakat. Di sini, “bank” mengacu pada sistem yang dipilih dan diterapkan oleh bank sampah. Direktur, bendahara, dan teller adalah beberapa contohnya. Selanjutnya adalah nasabah atau anggota bank sampah, prosedur menabung, mengumpulkan, menukarkan, menjual, dan sebagainya. Satu-satunya perbedaan yang tak terduga adalah bahwa daripada menabung uang, individu menabung sampah. Oleh karena itu, bank sampah dapat didefinisikan sebagai lokasi untuk “menabung” sampah. Bank sampah adalah organisasi lokal yang kecil. Bank sampah harus menggunakan sistem penghargaan karena bank sampah tidak dapat melakukan penghukuman kepada masyarakat. Cara pandang masyarakat terhadap sampah diubah melalui proses peningkatan kesadaran lingkungan melalui pengurangan sampah yang dinilai dengan uang atau rupiah. Sampah yang seharusnya dibuang menjadi bermanfaat.

2.4.2 Tujuan Dan Manfaat Bank Sampah

Tujuan dibuatnya bank adalah sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 Tentang Jakstranas (Kebijakan dan Strategi Nasional) dan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Manfaat bank,sampah,selain,dapat,membantu,pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah sangat berdampak baik bagi lingkungan. Mendirikan bank sampah memiliki beberapa tujuan, termasuk membantu Indonesia dalam menangani pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran akan perlunya lingkungan yang bersih dan sehat, dan mengubah sampah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis seperti kerajinan tangan dan pupuk.

Keuntungan dari bank sampah bagi masyarakat adalah dapat meningkatkan pendapatan karena masyarakat akan mendapatkan uang yang terkumpul di rekening mereka sebagai imbalan atas penukaran sampah. Ketika masyarakat memiliki tabungan dalam jumlah besar, mereka dapat menarik dana kapanpun mereka mau. Selain uang tunai, beberapa penabung menerima insentif dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, sabun, dan minyak.

2.4 Literasi Lingkungan

2.4.1 Pengertian Literasi Lingkungan

Secara etimologis, berasal dari bahasa Latin literatus yang berarti 'learned person' atau "orang yang belajar". Hal ini mengacu pada masa abad pertengahan yang menunjukkann suatu tinjauan dikatakannya seseorang "literatus" jika mampu serta mahir membaca dan menulis dalam bahasa Latin. Literasi dapat dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis dengan menggunakan sistem bahasa tulis, Tiarti, (2004:92). Pada awalnya, literasi dianggap terkait dengan pembelajaran, yaitu kegiatan menyerap informasi dan pengetahuan melalui membaca. Literasi juga pernah dikaitkan dengan kegiatan membaca. Membaca adalah kemampuan untuk memahami simbol-simbol bahasa, yang

kemudian diaplikasikan ke dalam latihan membaca teks untuk memahami pengetahuan dan informasi.

Lingkungan adalah suatu wadah disaat makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, juga memiliki karakter fungsi yang menjadi ciri khas terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks. Lingkungan terdiri unsur-unsur, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-undang RI No 32 tahun 2009, pasal 1 ayat 1).

Santoso, dkk (2021) literasi lingkungan adalah kemampuan untuk memahami semua aspek lingkungan, termasuk isu-isu terkini dan kemampuan untuk mengidentifikasi solusi bagi kesulitan, Utami (2019). Melestarikan lingkungan sangat penting untuk menghindari berbagai kerusakan alam, terutama yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Literasi lingkungan masyarakat Indonesia, termasuk kepedulian terhadap lingkungan, masih relatif rendah. Hal ini mengakibatkan sejumlah masalah yang mengabaikan lingkungan. Dapat dilihat dari hasil Survey Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 yang mengambil sampel pada 12 propinsi di wilayah Indonesia. Menghasilkan kesimpulan bahwa indeks perilaku masyarakat terhadap lingkungan secara nasional masih belum sepenuhnya baik. Rata-rata indeks secara nasional sebesar 0,57. Angka tersebut mengindikasikan masyarakat belum berperilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, Subhan (2017).

2.4.2 Komponen Literasi Lingkungan

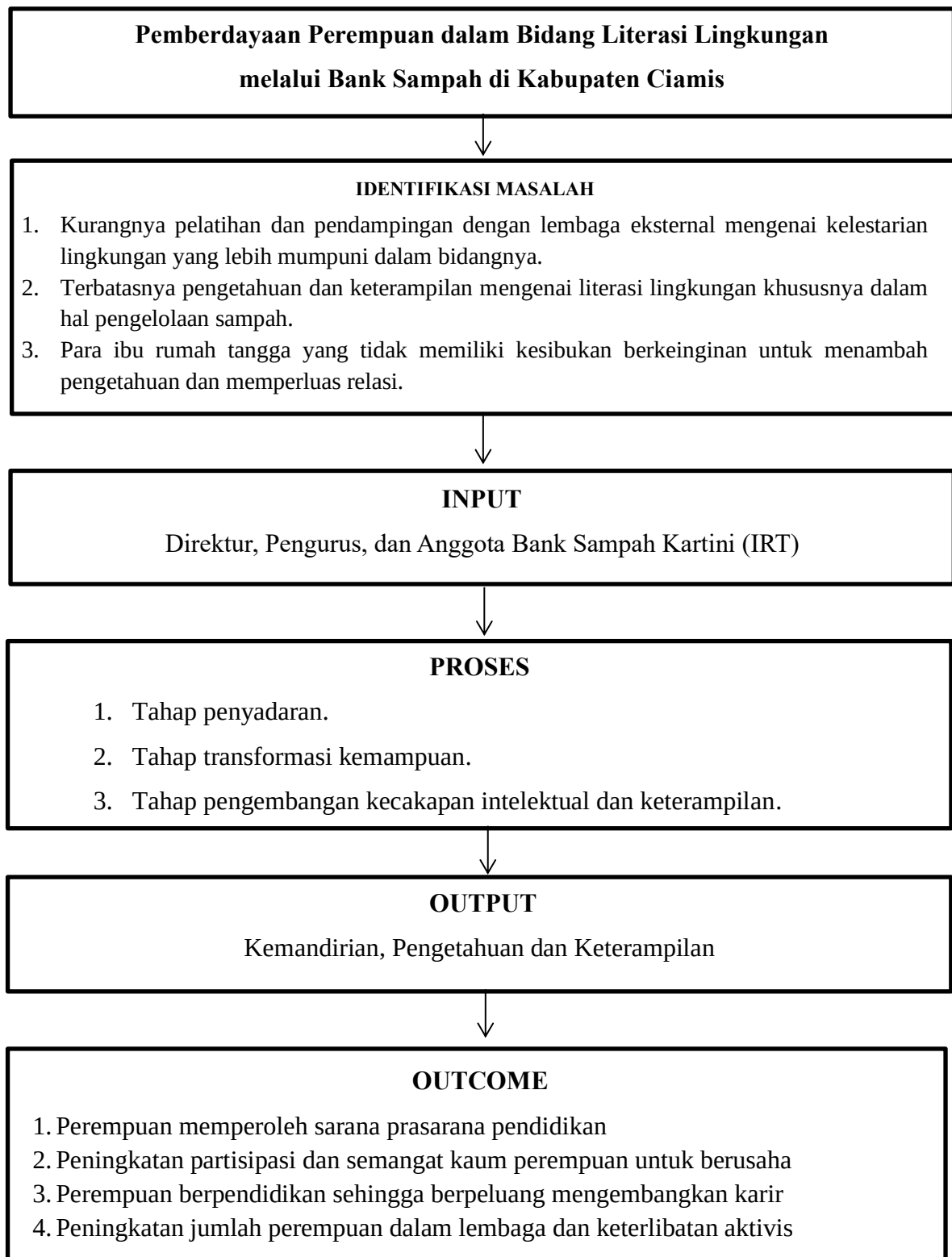
Hollweg, Taylor, & Bybee (2011) dalam (Kustiana, 2022) hal.16 menyatakan komponen utama pada literasi lingkungan diantaranya adalah *knowledge* (pengetahuan), *disposition* (watak), *competencies* (kompetensi), *environmentally responsible behavior* (perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan).

1. *Knowledge* (ilmu pengetahuan). Pengetahuan mencakup semua pengetahuan lingkungan individu, termasuk ilmu ekologi, sosial, politik, dan budaya, masalah lingkungan dan solusinya, keterlibatan masyarakat, dan langkah-langkah strategis untuk mencegah kerusakan lingkungan.
2. *Dispositions* (watak). Apakah seseorang sangat baik atau buruk dalam hal lingkungan tergantung pada watak atau dispositions.
3. *Competencies* (kompetensi). Kapasitas dan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi masalah lingkungan, mulai dari mengenalinya hingga mengevaluasinya dan menghasilkan solusi terbaik, dikenal sebagai kompetensi atau *competencies*.
4. *Environmentally Responsible Behavior* (perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan). Sebagai suatu perilaku tanggung jawab seseorang terhadap lingkungan. Mereka yang sudah memahami literasi lingkungan akan senantiasa menjaga kelestarian kondisi sekitarnya.

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Putri Anisa Soraya mahasiswa tahun 2021 dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Kartini Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemberdayaan yang dilakukan melalui proses dengan pendekatan 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halid dan kawan kawan di Nusa Tenggara Barat tahun 2022 dengan judul penelitian “Strategi Pengelolaan Sampah di NTB”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu peran bank sampah sangat penting dalam pengurangan sampah. Selain itu, strategi pengelolaan bank sampah yang baik tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan saja, tetapi juga bagi anggota nya dalam meningkatkan relasi, ekonomi, dan pengetahuan serta kemampuan dalam hal daur ulang sampah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hilmansyah Mahasiswa tahun 2024 dengan judul penelitian "Pengelolaan Sampah Berbasis Konsep 3R Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Desa (Studi di Bank Sampah Zakiah Kampung Waluri Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung)". Menyajikan proses pengelolaan sampah dengan berbasis konsep 3R. Dilakukan secara bertahap, dimulai dari sosialisasi edukasi dan pelatihan serta pengawasan kepada masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kampung Waluri merupakan hasil dari proses pemberian motivasi, materi mengenai lingkungan, serta keterampilan. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R di Bank Sampah Zakiah tidak hanya pengelolaan yang baik, disertai juga dengan peningkatan kesadaran lingkungan bagi masyarakat Kampung Waluri.

2.6 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan persoalan yang ditanyakan kepada narasumber atau informan terkait dengan topik yang akan diteliti. Pertanyaan pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Literasi Lingkungan Melalui Bank Sampah di Kabupaten Ciamis?